

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Het Herziene Indonesisch Reglement*

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
(ATR/BPN), Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun  
2009

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang  
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan  
1018/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan  
179/PDT/2023/PT.DKI

**Buku**

Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, Tuntunan Pembuatan Akta Tanah,  
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020)

Arie Sukanti Hutagalung, *et. al*, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Bali:  
Pustaka Larasan, 2012)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan Peraturan Hukum  
Tanah. (Jakarta: Djambatan, 2002)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang  
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003)

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983)

John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004)

Maya Shafira, *et. al*, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)

Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2020)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, 2016)

### **Jurnal**

Anastasya Triastutie P.S., dan I Made Pria Dharsana, “Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah Secara Lisan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 5, 2023, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p07>

Baharudin, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 5, No 1, 2014

Berti Nova Khafifa Bazar dan Ana Silviana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021

Christellia G. N. Lamatenggo, *et. al*, “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 1, 2021

- Christian E. Papendang, “Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik”, *Lex Privatum*, Vol. I, No.2, 2013
- Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Journalica*, Vol. 12, No. 3, 2015, DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1225>
- Dewi Rasda, *et. al*, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah”, *Litigasi*, Vol. 9 , No. 1, 2021.
- Dian Pratiwi Ahmad, *et. al*, “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Crimen*, 2022
- Dwi Augustia Ningsih, “Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat”, *Notarius*, Vol 1, No.2, 2022
- Fajar Iswahyudi, Pengenaan Retribusi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dipersimpangan Jalan, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 16, No. 1, 2012
- Fathimah Fithriah, “Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/PDT/2017)”, *Indonesian Notary*, Vol 3, 2021
- Fence M Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012

- Ghita Aprillia Tulenan, “Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris”, *Lex Administratum*, Vol. II, No.2, 2014
- Giovanni Rondonuwu, “Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Lex Privatum*, Vol. V, No. 4, 2017
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Dharmawangsa* Edisi 59, 2019, DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Husain Asmara DM, “Peran Notaris-PPAT dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Bank Syariah”, *Lex Reinassance*, No. 2 Vol. 3, 2018, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art9>
- Ida Ayu Kade dan Rienda Cintya Dewi, “Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: *Mandatory Vs Voluntary*”, *Acta Comitatus*, Vol. 03, No. 02, 2018, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p04>
- Kadek Cahya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif *Bestuurs Bevoegdheid*”, *Jurnal Crepido* Vol. 1, No. 1, 2019, DOI : <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Ed. 1, 2020

Ladi Amelia Pelsius, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Reinnasance*, No. 1, Vol. 2, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal *Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019, DOI : <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Maulida Luthfiyatul Azizah dan Muhaimin, “Kajian Yuridis Penandatanganan Akta yang dilakukan Notaris di Luar Kantor berdasarkan Alasan-Alasan Tertentu”, *Notary Law Journal*, Vol 1 Issue 4, 2022, DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.17>

Nabila Ayu Larasati, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Dua Akta Jual Beli dengan Objek yang Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG)”, *Indonesian Notary*, Vol. 2, Article 19, 2020

Natasya Elvara Yusuf dan Gunawan Djajaputera, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Istri Sah dari Salah Satu Penghadap (Studi Kasus Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/PDT.G/2017/PN

SRG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN  
*Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/PDT/2019), *Jurnal Hukum*  
*Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021

Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks  
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Arena*  
*Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014

Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, *Kertha Widya Jurnal*  
*Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, DOI : <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>

Puteri Bahari, “Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Keterangan Terhadap  
Akta Yang Dibuat di Hadapannya (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PID.  
B/2013/PN-LSM)”. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol 1, No 2, 2022

R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam  
Pengujian Undang Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 2, 2020, DOI:  
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Ratri Puspita Suryandari, *et. al*, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-Syarat  
Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Notaris”, *Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020

Retno Kus Setyowati dan Asmaniar, “Pembatalan Transaksi Hak Atas Tanah Oleh Penjual Dengan Alasan Belum Lunas”, *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.362>

Rio Utomo Hably, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta *Partij* (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K /PID/2015. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 2 Nomor 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562>

Saikho Asa’li, “Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi yang Beragama Islam”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018

Sardi Laiti dan Fenty U. Puluhulawa, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang Mengakibatkan Kerugian Negara”, *Philosophia Law Review*, 2022

Sharon Eunice, “Kedudukan Akta di Bawah Tangan yang Membatalkan Akta Notariil”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 4, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v4i1>

Taufik Hidayat Lubis, “Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal CERED: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 2021, DOI : <https://doi.org/10.62281/v2i3.204>



Umar Maaruf dan Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2, No 3, 2015

Zahermann Armandz Muabezi. “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*) : *Rule of Law and Not Power State*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6, No 13, 2017, DOI : <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>

### **Website**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pencarian : PPAT”, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ppat&jenis\\_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t\\_put=2023&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ppat&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=2023&t_reg=&t_upl=&t_pr=), diakses pada 20 Februari 2024

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus Versi *online/daring* (dalam jaringan), “*cerai*”, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada 08 Juli 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus Versi *online/daring* (dalam jaringan), “*hadap*”, <https://kbbi.web.id/hadap>, diakses pada 06 Mei 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kamus Versi *online/daring* (dalam jaringan), “*identitas*”, <https://kbbi.web.id/identitas>, diakses pada 08 Juli 2024

*The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed, "FORGERY Definition & Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/forgery/>, diakses pada 24 April 2024*

*The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed, "IDENTITY Definition & Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/identity/>, diakses pada 8 Juli 2024*

*The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed, "OFFICIALS Definition & Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/officials/>, diakses pada 02 Maret 2024*

*The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed, "REGISTRAR Definition & Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/registrar/>, diakses pada 02 Maret 2024*

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Budi Wangsaraharja, Notaris/PPAT Kota Semarang, tanggal 3 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB